



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Faktor-Faktor Penyebab Ekstensi Pemberlakuan Sanksi Ekonomi
Uni Eropa kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea

Skripsi

Oleh

Ghina Cecilia

2015330089

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Faktor-Faktor Penyebab Ekstensi Pemberlakuan Sanksi Ekonomi
Uni Eropa kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea

Skripsi

Oleh

Ghina Cecilia

2015330089

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ghina Cecilia
Nomor Pokok : 2015330089
Judul : Faktor-faktor Penyebab Ekstensi Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Uni Eropa kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 23 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe

: _____

Sekretaris
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

: _____

Anggota
Adrianus Harsawaskita, S,IP., M.A

: _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ghina Cecilia

NPM : 2015330089

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Ekstensi Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip dan ditulis dalam karya ini dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia untuk menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan.

Bandung, 8 Agustus 2019

Ghina Cecilia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Ekstensi Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea” ini dengan baik dan tepat waktu. Penelitian dilakukan dan diselesaikan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 (S1) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dengan segala ketidaksempurnaan dan kekeliruan yang tersurat dalam skripsi ini, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, argument, maupun analisis yang penulis paparkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Yulius Purwadi Hermawan selaku dosen pembimbing, yang selama lima bulan terakhir telah memberikan sangat banyak masukan yang amat berguna bagi penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, baik mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum serta berdampak bagi penelitian lebih lanjut.

Bandung, 8 Agustus 2019

Ghina Cecilia

Abstrak

Nama : Ghina Cecilia

NPM : 2015330089

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Ekstensi Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea

Aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia pada bulan Maret 2014 memicu respon dari Uni Eropa berupa pemberian sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi ini bertujuan untuk menekan perekonomian nasional Rusia sehingga Rusia bersedia untuk mengubah kebijakan luar negerinya terkait Krimea. Sanksi ekonomi yang pada awalnya direncanakan berlaku selama 6 bulan nyatanya terus mengalami ekstensi masa berlaku hingga setidaknya tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan ekstensi masa berlaku sanksi ekonomi Uni Eropa kepada Rusia. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah ***Mengapa Uni Eropa melakukan ekstensi terhadap masa berlaku sanksi ekonomi yang diberikan kepada Rusia pasca aneksasi Krimea?*** Dengan menggunakan konsep sanksi ekonomi dari Robert A. Pape dan Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, dan Barbara Oegg, penelitian ini menghasilkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian berupa beberapa poin faktor. Faktor ketahanan Rusia dalam menghadapi sanksi, faktor disintegrasi politik dalam negeri Ukraina, serta faktor ketidakmampuan Uni Eropa untuk mencegah negara anggotanya untuk melakukan perdagangan energi dengan Rusia menjadi pendorong bagi Uni Eropa untuk melakukan ekstensi sanksi ekonomi kepada Rusia.

Kata kunci: *Sanksi Ekonomi, Aneksasi Krimea, Uni Eropa, Kegagalan Sanksi Ekonomi, HSEO.*

Abstract

Name : Ghina Cecilia

NPM : 2015330089

Title : The Factors Causing the Extension of the Economic Sanction Enforcement Given by the European Union to Russia After the Annexation of Crimea

The Annexation of Crimea done by Russia on March 2014 triggered responses from the European Union in the form of economic sanctions. The economic sanctions aims to give pressure on Russia's national economy so that Russia is willing to change its foreign policy on Crimea. The economic sanctions which was intended to be enforced only for 6 months in fact is extended until at least the year of 2020.

This research aims to describe the factors causing the extension of the economic sanction given by the European Union to Russia. The research question asked in this research is *Why did the European Union keep making extensions of enforcement of the economic sanctions given to Russia after the Annexation of Crimea?* By using concepts of economic sanction stated by Robert A. Pape and Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, dan Barbara Oegg (HSEO), this research shows that the ability of Russia to withstand the economic sanctions, Ukraine's disintegrated domestic politics, and the European Union's inability to prevent its member states to have energy trade with Russia are the factors pushing the European Union to extend its economic sanctions to Russia.

Keywords: *Economic Sanctions, Annexation of Crimea, European Union, Failure of Economic Sanctions, HSEO.*

DAFTAR ISI

1.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
1 BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Kajian Pustaka	6
1.5 Kerangka Teori.....	8
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	16
1.6.1 Metode Penelitian.....	16
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7 Sistematika Pembahasan	17
2 BAB II.....	19
PENGARUH RUSIA DALAM KRISIS KRIMEA.....	19
2.1 Peran Rusia dalam Krisis Krimea	20
2.1.1 Sebab-Sebab Keterlibatan Rusia dalam Konflik Krimea.....	20
2.1.2 Sebab Historis	21
2.1.3 Sebab Politik	25
2.1.4 Sebab Geopolitis	30
2.1.5 Sebab Ekonomis.....	32
2.2 Perjanjian Minsk.....	35
2.2.1 Perjanjian Minsk I.....	35

2.2.2	Perjanjian Minsk II.....	38
3	BAB III	43
	Sanksi Ekonomi Uni Eropa kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea Tahun 2014 .	43
3.1	Keputusan Uni Eropa untuk Memberikan Sanksi Ekonomi kepada Rusia Pasca Aneksasi Krimea	44
3.2	Penerapan Sanksi Ekonomi Uni Eropa kepada Rusia	49
3.3	Implikasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa bagi Rusia	58
4	BAB IV	64
	Faktor-Faktor Penyebab Ekstensi Masa Berlaku Sanksi Ekonomi Uni Eropa kepada Rusia	64
4.1	Kemampuan Rusia untuk Menanggulangi Dampak Sanksi Ekonomi Uni Eropa	64
4.2	Kondisi Politik Ukraina dan Ketidakmampuannya untuk Menekan Pergerakan Rusia dalam Krisis Krimea.....	73
4.3	Pertimbangan Internal Uni Eropa dalam Implementasi Sanksi Ekonomi kepada Rusia.....	79
5	BAB V	86
	KESIMPULAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Peta sebaran negara yang diberi sanksi ekonomi oleh Uni Eropa..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada tanggal 18 Maret 2014, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menandatangani rancangan undang-undang yang mengatur tentang bergabungnya kembali wilayah Krimea dengan Rusia.¹ Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Peristiwa Aneksasi Krimea oleh Rusia. Aneksasi Krimea terjadi menyusul adanya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Krimea yang merupakan keturunan asli bangsa Rusia.² Sejak pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, Krimea tergabung dalam wilayah Pemerintahan Ukraina yang telah merdeka dengan status wilayah otonomi khusus.³ Namun, tak lama setelah Krimea resmi tergabung dengan Ukraina, kelompok masyarakat keturunan bangsa Rusia di Krimea menuntut kemerdekaan Krimea dari Ukraina untuk dapat kembali bergabung dengan Rusia, yang terus berlangsung hingga tahun 2014.⁴ Terpisahnya Krimea dari Rusia sendiri terjadi karena pada tahun 1951 pemimpin Uni Soviet pada masa itu, Nikita Khrushchev, memberikan wilayah Krimea kepada Negara Soviet Ukraina sebagai hadiah perayaan 300 tahun

¹ Kantor Berita BBC. "Ukraine Crisis: Putin Signs Russia-Crimea Treaty".

<https://www.bbc.com/news/world-europe-26630062>. Diakses pada 20 Mei 2019

² Okan Yeşilot. "The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics". *Insight Turkey Vol. 16 No. 2, Elections and Turkish Democracy Political Parties, Ideologies and Representation*, 2014

³ Ibid.

⁴ Austin Charron. "Whose is Crimea? Contested Sovereignty and Regional Identity". *Region*, Vol. 5 No. 2, Edisi Khusus: "Centrifugal Forces? Russia's Regional Identities and Initiatives". Hal. 225.

ditandatanganinya Traktat Pereyaslav yang menandai persatuan Ukraina dengan Rusia.⁵

Pemberontakan masyarakat Krimea yang telah sejak lama terjadi merupakan salah satu penyebab terjadinya Krisis Krimea pada tahun 2014. Pemberontakan ini berkembang menjadi krisis dengan adanya dukungan dari Rusia. Keterlibatan Rusia dalam perkembangan Krisis Krimea dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan beberapa tokoh politik yang Rusia dalam mengorganisir pergerakan kelompok Pro-Rusia di Krimea. Beberapa tokoh politik tersebut mencakup anggota *Duma*, atau Parlemen Rusia. Pemberontakan tersebut mencapai puncak ketika pada tanggal 16 Maret 2014 diadakan referendum oleh masyarakat Krimea untuk memutuskan nasib Krimea, apakah akan bergabung dengan Rusia atau bertahan bersama Ukraina. Hasil referendum menunjukkan bahwa 95,% pemilih menginginkan kembalinya Krimea kepada Rusia. Pasca referendum, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan di hadapan seluruh Anggota Dewan Federasi Rusia, Anggota *Duma*, perwakilan masyarakat Krimea dan Sevastopol, serta masyarakat Rusia bahwa Krimea telah secara resmi kembali menjadi bagian dari Rusia setelah mengalami perjuangan yang panjang.⁶

⁵ Mark Kramer. “*The Transfer of Crimea from Soviet Russia to Soviet Ukraine, 1954*”. Cold War International History Project, Wilson Center. <https://www.wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-away-crimea-sixty-years-ago>. Diakses pada 11 Maret 2019.

⁶ Kantor Berita Kepresidenan Rusia. “*Address by President of the Russian Federation*”, diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2014. <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>. Diakses pada 10 Juli 2019.

1.2 Identifikasi Permasalahan

1.2.1 Deskripsi Masalah

Ukraina merupakan salah satu negara di Eropa Timur yang cukup memiliki kedekatan dengan Uni Eropa. Kedekatan ini ditandai oleh adanya kelompok politik yang berorientasi kepada Uni Eropa dan sekutunya untuk berusaha menghilangkan pengaruh Rusia di Ukraina.⁷ Sejak merdeka dari Uni Soviet pada awal dekade 1990, Ukraina telah mengalami banyak permasalahan integrasi dalam negeri, salah satunya disebabkan oleh kuatnya pengaruh Rusia di Ukraina. Salah satu yang menjadi masalah hingga kini adalah upaya Rusia untuk mengambalalih wilayah Krimea. Upaya ini terwujud pada bulan Maret 2014, dimana masyarakat Krimea atas dukungan Rusia melakukan referendum untuk berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Sebagai salah satu kekuatan regional di Eropa, Uni Eropa merespon tindakan aneksasi Rusia atas Krimea. Peristiwa Aneksasi Krimea sendiri dapat menimbulkan dua interpretasi yang berbeda. Bagi Uni Eropa, aneksasi merupakan tindakan Rusia yang melanggar kedaulatan Ukraina serta menimbulkan destabilisasi di wilayah kedaulatan Ukraina, sehingga diperlukan adanya tindakan untuk menghentikan langkah Rusia di Semenanjung Krimea.⁸ Sedangkan bagi pihak Rusia, aneksasi Krimea diinterpretasikan sebagai tindakan balas dendam atas tindakan NATO dan Uni Eropa yang dianggap memperluas wilayahnya

⁷ Okan Yeşilot. "The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics". *Insight Turkey*, Vol. 16 No. 2, *Elections and Turkish Democracy Political Parties, Ideologies and Representation* (2014), Hlm. 172.

⁸ Gerakan Eksternal Uni Eropa. "EU Restrictive Measures in Response to the Crisis in Ukraine". https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8322/EU%20restrictive%20measures%20in%20response%20to%20the%20crisis%20in%20Ukraine. Diakses pada 9 Juli 2019.

melewati batas Jerman sebagaimana yang dijanjikan.⁹ Bagi Uni Eropa, mengutuk tindakan Rusia dengan pernyataan saja tidak cukup, sehingga muncul sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa serta beberapa negara lainnya yang tergabung dalam Organisasi Traktat Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sanksi yang diberikan berupa sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, sanksi pembatasan bagi individu-individu tertentu, pembatasan hubungan ekonomi dengan Ukraina dan Sevastopol, dan pembatasan untuk melakukan hubungan perdagangan bagi Rusia dengan beberapa negara.¹⁰ Sanksi ini diharapkan dapat menekan pergerakan Rusia sehingga pada akhirnya Rusia dapat mengalah dan mengubah kebijakannya terkait status Krimea dan keterlibatan Rusia di Ukraina. Sanksi diberlakukan selama 6 bulan sejak Maret 2014 dan diharapkan dapat berakhir dengan tujuan yang telah tercapai.

Namun, sanksi yang pada awalnya direncanakan hanya berlangsung selama 6 bulan dan diharapkan berakhir pada Agustus 2014 secara berulang kali mengalami ekstensi masa berlaku. Hingga ditulisnya tugas akhir ini, ekstensi masa berlaku sanksi-sanksi tersebut terakhir kali dilakukan pada bulan Juni 2019, dimana Dewan Uni Eropa memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku sanksi bagi Rusia hingga tanggal 23 Juni 2020.¹¹ Hal ini kemudian seakan mempertanyakan efektifitas sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa kepada Rusia,

⁹ Michael Rühle. “*NATO Enlargement and Russia: Myths and Realities*”. Organisasi Traktat Atlantik Utara (NATO). https://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Nato-enlargement-Russia/EN/index.htm?utm_medium=email&utm_campaign=NATO. Diakses pada 2 Juli 2019.

¹⁰ Dewan Eropa dalam Dewan Uni Eropa. “*EU Restrictive Measures in Response to the Crisis in Ukraine*”. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/>. Diakses pada 20 Mei 2019.

¹¹ Dewan Eropa dalam Dewan Uni Eropa. “*Timeline – EU Restrictive Measures in Response to the Crisis in Ukraine*”. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/>. Diakses pada 24 Juni 2019.

karena apabila sanksi ini benar-benar efektif mungkin Uni Eropa tidak perlu melakukan ekstensi masa berlaku sanksi tersebut.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Atas kemunculan anomali dalam kasus dijatuhkannya sanksi dari Uni Eropa kepada Rusia, maka muncul pertanyaan penelitian: *Mengapa Uni Eropa melakukan ekstensi terhadap masa berlaku sanksi ekonomi yang diberikan kepada Rusia pasca aneksasi Krimea?* Penelitian ini dibatasi secara waktu dari tahun 2014 hingga Mei 2019. Pembatasan ini diambil berdasarkan waktu dimulainya konflik terkait aneksasi Krimea oleh Rusia, yaitu pada bulan Maret 2014 hingga berita terbaru mengenai posisi Rusia serta ekstensi sanksi ekonomi Uni Eropa pada tahun 2019.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan paparan terkait alasan mengapa Uni Eropa berulang kali melakukan ekstensi masa berlaku sanksi ekonomi yang diberikannya kepada Rusia pasca aneksasi Krimea. Dengan dilakukannya analisa dari kasus ini, diharapkan hasil analisa tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya sehingga dapat memberikan kesimpulan bagi penelitian ini.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar dalam jenjang sarjana bagi penulis. Kegunaan lain dari dilakukannya

penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada penstudi ilmu hubungan internasional, khususnya berkaitan dengan studi organisasi internasional, organisasi regional, Uni Eropa, Rusia, atau sanksi ekonomi terkait mengapa Uni Eropa melakukan ekstensi masa berlaku sanksi ekonomi kepada Rusia.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam membantu proses penentuan acuan dan penulisan penelitian ini, telah dikaji beberapa literatur karya penstudi sebelumnya terkait keterlibatan Rusia dalam Krisis Krimea, respon Uni Eropa atas tindakan Rusia berupa pemberian sanksi, serta literatur yang membahas respon Rusia dalam menghadapi sanksi yang dijatuhkan. Literatur pertama adalah sebuah buku yang ditulis oleh Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, dan Barbara Oegg (selanjutnya disebut HSEO), dengan judul *Economic Sanctions Reconsidered*.¹² Buku ini memaparkan tentang bagaimana sanksi ekonomi dapat bekerja untuk memberikan tekanan bagi negara target untuk mengubah kebijakannya. Selain itu, dalam buku ini HSEO mencoba menawarkan metode yang dapat digunakan untuk menghitung efektifitas sanksi ekonomi yang diberikan kepada suatu pihak, yang seringkali berupa negara. Bagi penelitian ini, buku *Economic Sanctions Reconsidered* memberikan metode untuk mengukur efektifitas sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

¹² Gary Clyde Hufbauer, et al. *Economic Sanctions Reconsidered*. Washington, DC: Peter G. Peterson Institute for International Economics (2007).

Literatur kedua ditulis oleh Okan Yeşilot. Esai berjudul *The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics* ini mengkaji bagaimana Rusia sangat terlibat dalam berkembangnya Krisis Krimea sejak dekade 1990.¹³ Tokoh-tokoh politik Rusia terlihat sangat terlibat dalam upaya untuk mendorong agar masyarakat keturunan bangsa Rusia di Krimea melakukan pemberontakan kepada Pemerintah Ukraina dan menuntut kemerdekaan agar Krimea dapat bergabung dengan Rusia. Artikel ini juga menjabarkan kepentingan geopolitik Rusia di wilayah Krimea dan Laut Hitam yang mendorong tindakan aneksasi atas Krimea. Artikel ini memberikan materi untuk penulisan penelitian ini berupa penjelasan terkait keterlibatan Rusia dalam Krisis Krimea serta kepentingan geopolitik Rusia yang menjadi faktor pendorong utama bagi munculnya tindakan aneksasi atas Krimea.

Literatur ketiga ditulis oleh M. C. Pugh dalam artikelnya yang berjudul *International Intervention*.¹⁴ Dalam artikel ini, Pugh berusaha untuk memaparkan peristiwa intervensi internasional. Pugh mengemukakan bahwa pada dasarnya intervensi internasional dilakukan oleh negara yang lebih kuat dan memiliki kapabilitas yang lebih tinggi dari rata-rata negara di wilayah yang sama dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Selain itu, negara yang diintervensi merupakan negara yang cenderung termarginalisasi. Pugh juga mengemukakan jenis karakteristik serta jenis intervensi internasional yang seringkali dilakukan, salah satunya melalui tindakan kekerasan. Literatur ini dapat

¹³ Okan Yeşilot. Op. cit.

¹⁴ M. C. Pugh dalam *International Relations*, Vol. II. oleh Jarrod Wiener dan Robert A. Schrire. "International Intervention". Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), UNESCO. Hlm. 3-4.

memberikan penjelasan tentang intervensi melalui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rusia dalam krisis Krimea, terutama melalui aneksasi.

Literatur kedua ditulis oleh Austin Charron dengan judul *Whose is Crimea? Contested Sovereignty and Regional Identity*.¹⁵ Pada dasarnya, artikel ini berusaha untuk memberikan gambaran atas status kepemilikan atas Krimea. Charron menjelaskan bahwa Krimea sejak tahun 1991 selalu menjadi perebutan antara Ukraina dan Rusia. Kedua negara tersebut mengaku memiliki klaim yang kuat atas kepemilikan Krimea, sehingga perebutan yang berujung pada konflik tidak dapat dihindarkan. Artikel ini memberikan materi terkait konflik perebutan Krimea dan klaim-klaim yang dilakukan oleh Ukraina dan Rusia atas Krimea.

1.5 Kerangka Teori

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penelitian ini, akan digunakan beberapa teori. Teori serta konsep yang akan digunakan diantaranya Konsep Perang Ekonomi, Konsep Intervensi Internasional, Konsep Efektifitas Sanksi, dan Konsep HSEO yang menunjukkan 5 Tujuan Sanksi.

Konsep Perang Ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari Tor Egil Følrand dalam artikelnya yang berjudul *History of Economic Warfare: International Law, Effectiveness, Strategies*. Følrand mendefinisikan Perang Ekonomi sebagai suatu gangguan ekonomi bagi negara musuh secara koersif dan

¹⁵ Austin Charron. "Whose is Crimea? Contested Sovereignty and Regional Identity". *Region*, Vol. 5 No. 2, Edisi Khusus: "Centrifugal Forces? Russia's Regional Identities and Initiatives". Hlm. 225.

intens, yang bertujuan untuk mengurangi kekuatannya.¹⁶ Perang ekonomi dibedakan dari perang militer, karena perang ekonomi murni bertujuan untuk menyerang sektor ekonomi negara target, bukan kepada sektor militer sebagaimana yang menjadi tujuan perang militer. Salah satu metode paling umum dalam perang ekonomi yang digunakan oleh negara penyerang adalah melalui hukum internasional. Tujuan perang ekonomi untuk mengurangi kekuatan negara target dicapai melalui cara-cara yang mendorong adanya perubahan kebijakan negara target. Terkecuali perang tersebut menimbulkan revolusi untuk mengganti pemerintahan yang sedang berkuasa, elit politik negara musuh akan selalu menjadi target perang. Agar strategi ini berhasil, negara penyerang harus membuat ketidakseimbangan kondisi dalam negeri negara target sehingga memaksa para elit negara target untuk mundur dari posisinya.

Konsep perang ekonomi sangat menjelaskan situasi yang terjadi antara Uni Eropa dan Rusia dalam konteks pemberian sanksi ekonomi pasca aneksasi Krimea. Uni Eropa sebagai negara penyerang menggunakan sanksi sebagai instrumen untuk menyerang perekonomian Rusia. Sanksi ekonomi ini ditujukan untuk melemahkan kekuatan perekonomian Rusia yang sangat bergantung kepada perdagangan energi, terutama minyak bumi dan gas alam, melalui pembatasan kegiatan ekspor dan impor dalam sektor tersebut. Selain itu, elit-elit politik di Rusia yang mendukung terjadinya aneksasi Krimea dan krisis di semenanjung Krimea juga menjadi target dari perang ekonomi ini melalui sanksi ekonomi berupa pembekuan aset pribadi yang ditujukan kepada masing-masing elit

¹⁶ Tor Egil Følrand. "The History of Economic Warfare: International Law, Effectiveness, Strategies". *Journal of Peace and Research*, Vol. 30, No. 2 (Mei 1993). Hlm. 151.

tersebut. Lebih lanjut detail sanksi yang diberikan kepada Rusia oleh Uni Eropa dicantumkan dalam bab III dan bagian lampiran penelitian ini.

Konsep intervensi internasional yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari M. C. Pugh dalam artikelnya yang berjudul *International Intervention*. Dalam artikel tersebut, Pugh mengemukakan bahwa intervensi internasional, khususnya yang dilakukan oleh negara, pada umumnya berasal dari negara yang relatif lebih kuat di dunia atau negara yang merupakan hegemon dalam lingkungan regionalnya.¹⁷ Intervensi juga merefleksikan adanya kesenjangan dalam sistem internasional, khususnya kesenjangan kekuatan. Menurut Pugh, bukan sebuah kebetulan apabila negara yang mengalami intervensi adalah negara yang termarginalkan di wilayahnya.

Terdapat beberapa karakteristik intervensi internasional yang dijabarkan oleh Pugh, yaitu penyelesaian secara damai, tindakan pemaksaan, penggunaan kekerasan, menjaga perdamaian, mandat, dan intervensi paksa. Penyelesaian secara damai tidak dilakukan melalui cara-cara yang melibatkan kekerasan dan operasi militer, melainkan pada umumnya menggunakan intervensi oleh tim perdamaian yang dikirimkan ke negara tujuan yang terdiri atas sukarelawan warga sipil. Tindakan pemaksaan pada umumnya dilakukan kepada negara-negara yang pemerintahnya tidak memiliki pilihan lain atas tindakan yang harus dilakukan dalam rangka menghadapi suatu isu tertentu. Sebagai contoh, intervensi ekonomi dilakukan kepada suatu negara yang mengalami krisis ekonomi, sehingga pemerintah harus mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh intervenor.

¹⁷ M. C. Pugh dalam *International Relations*, Vol. II. oleh Jarrod Wiener dan Robert A. Schrire. "International Intervention". Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), UNESCO. Hlm. 3-4.

Penggunaan kekerasan meliputi adanya pelintasan garis batas yurisdiksi suatu negara oleh intervenor dengan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu, melalui perang, penaklukan, atau aneksasi. Menjaga perdamaian diartikan sebagai suatu upaya intervensi yang bertujuan untuk melakukan patroli di wilayah-wilayah penyangga serta memantau keberlangsungan gencatan senjata antara pihak-pihak yang berkonflik. Mandat merupakan intervensi yang dilakukan berdasarkan kepada mandat yang umumnya diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik dengan atau tanpa keterlibatan operasi militer. Intervensi paksa dilakukan ketika PBB secara terpaksa perlu menginisiasi operasi-operasi militer di wilayah konflik karena kondisi yang mengharuskan PBB bertindak demikian. Karakteristik intervensi internasional melalui penggunaan kekerasan digunakan untuk menjelaskan keterlibatan Rusia dalam krisis Krimea pada bab II penelitian ini.

Teori sanksi yang seringkali digunakan dalam mengukur efektifitas sanksi ekonomi adalah teori yang dicetuskan oleh Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, dan Barbara Oegg dalam buku *Economic Sanctions Reconsidered*. Teori yang dikenal dengan nama teori HSEO ini berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh keempat ahli tersebut terkait efektifitas sanksi ekonomi yang banyak diberikan oleh negara-negara dan organisasi internasional dunia pasca Perang Dunia II. Sanksi ekonomi sendiri muncul karena solusi secara militer dianggap memiliki resiko yang lebih besar bagi negara pemberi sanksi dan lebih mahal. Selain itu, HSEO juga mencoba untuk menepis pemikiran skeptis

para penstudi lain yang berpendapat bahwa sanksi ekonomi akan selalu gagal.¹⁸

Menurut HSEO, terdapat lima tujuan yang dimiliki oleh pemberian sanksi ekonomi, yaitu:

1. Menekan negara target untuk mengganti kebijakan-kebijakan yang ditargetkan melalui cara-cara yang relatif sederhana dan terbatas;
2. Mengubah rezim yang berkuasa di negara target melalui cara-cara destabilisasi kondisi politik negara target;
3. Mengacaukan kegiatan eksplorasi militer negara target;
4. Melemahkan potensi militer negara target;
5. Mengubah kebijakan-kebijakan negara target melalui cara besar lainnya, misalnya dengan memaksa negara untuk menyerahkan sebagian wilayah teritorinya.

Dalam menerapkan sanksi ekonomi, terdapat tiga cara utama menurut HSEO. Cara pertama adalah dengan menerapkan limitasi pada kegiatan ekspor negara target. Cara kedua adalah dengan membatasi kegiatan impor negara pemberi sanksi dari negara target. Di antara kedua cara ini, limitasi ekspor pada umumnya lebih sering digunakan oleh negara pemberi sanksi dari pada pembatasan impor.¹⁹ Cara ketiga adalah dengan menghambat jalannya kegiatan finansial negara target. Kegiatan finansial yang dimaksud berupa layanan keuangan komersil, pemberian kredit dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta melalui pembekuan dan penyitaan aset milik individu-individu tertentu yang dianggap berkontribusi penting dalam pembuatan kebijakan di negara target. Pembekuan dan penyitaan aset individu juga dapat diikuti dengan diberikannya larangan bepergian bagi individu tersebut. Sanksi atas individu

¹⁸ Gary Clyde Hufbauer, et al. *Economic Sanctions Reconsidered*. Washington, DC: Peter G. Peterson Institute for International Economics (2007). Hlm. 9.

¹⁹ Ibid., Hlm 45.

disebut pula dalam HSEO sebagai sanksi cerdas (*smart sanction*), yang berarti cara yang dapat dilakukan oleh negara pemberi sanksi agar sanksi lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sipil yang tidak memiliki andil dalam pembuatan kebijakan yang menjadi target sanksi.

Meski bertujuan untuk mendukung kekuatan sanksi ekonomi sebagai pengganti koersi militer, HSEO juga memaparkan hal yang selama ini menjadi penyebab kegagalan sanksi ekonomi. Penyebab-penyebab yang dimaksud sebagai berikut:

1. Sanksi sangat mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tujuannya, yaitu untuk menekan negara target agar mengubah kebijakannya. Hal ini disebabkan oleh tujuan yang terlalu sulit untuk dicapai.
2. Sanksi dapat memunculkan penawarnya sendiri, baik dengan mempersatukan negara target untuk mendukung pemerintahan yang berkuasa maupun dengan memunculkan dorongan agar negara target berupaya untuk mencari substitusi sebagai alternatif dari komoditas barang atau jasa yang dilarang dalam sanksi ekonomi.
3. Sanksi dapat mendorong keterlibatan sekutu negara target yang lebih kuat dan lebih makmur untuk mengambil peran “ksatria hitam”, yaitu peran sebagai penolong bagi negara target dalam menghadapi pemberi sanksi.
4. Sanksi ekonomi dinilai dapat mengasingkan sekutu yang dimiliki oleh pemberi sanksi serta mengabaikan kepentingan ekonomi dalam negeri negara pemberi sanksi, seperti dalam kasus ditentangnya sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Uni Soviet pada masa Perang Dingin yang dinilai tidak tepat sasaran dan merugikan negara-negara di wilayah Uni Ekonomi Eropa (EEC).

Dalam menilai efektifitas sanksi, HSEO memberikan suatu metode yang nantinya menghasilkan sejumlah nilai berdasarkan tingkat pengaruh sanksi bagi negara target. Terdapat dua elemen yang menentukan nilai keberhasilan sanksi ekonomi, yaitu hasil kebijakan dan kontribusi sanksi. Setiap elemen memiliki skala nilai 1 hingga 4, dimana 1 menjadi nilai terendah dan 4 adalah nilai tertinggi. Nilai keberhasilan memiliki skala nilai 1 hingga 16, dengan nilai 9 hingga 16 berarti sanksi dianggap mengalami keberhasilan dan nilai 1 hingga 8 berarti sanksi dianggap tidak efektif atau bahkan gagal sama sekali.

Tabel 1.1 Penghitungan Nilai Efektifitas Sanksi HSEO

		Nilai Elemen Hasil Kebijakan				
		X	1	2	3	4
Nilai Elemen Kontribusi Kebiijakan	1	1	2	3	4	
	2	2	4	6	8	
	3	3	6	9	12	
	4	4	8	12	16	
	Total Nilai Efektifitas Sanksi					

Teori HSEO digunakan dalam Bab III dan Bab IV penelitian ini untuk membantu memberikan penjelasan tentang jenis sanksi yang diberikan oleh Uni

Eropa kepada Rusia pasca aneksasi Krimea serta untuk melakukan analisis efektifitas sanksi yang terus diperpanjang masa berlakunya oleh Uni Eropa setidaknya hingga penelitian ini ditulis.

Bila HSEO mencoba untuk memaparkan bagaimana sanksi ekonomi dapat bekerja sebagai pengganti operasi militer sebagai upaya untuk menekan negara target, Robert A. Pape berusaha untuk menyanggah HSEO dalam beberapa hal terkait efektifitas sanksi ekonomi. Dalam artikelnya yang berjudul “*Why Economic Sanctions Do Not Work?*”, Pape menjelaskan bahwa sanksi ekonomi tidak akan selalu bekerja lebih baik dari pada koersi militer karena adanya negara modern dinilai tidak rapuh. Negara modern memiliki kemampuan untuk bertahan dari sanksi ekonomi yang diberikan kepadanya. Menurut Pape, bahkan di negara yang paling rapuh sekalipun tekanan sanksi ekonomi dari luar malah akan memberikan lebih banyak legitimasi bagi pemerintahan yang sedang berkuasa di negara target serta legitimasi bagi kebijakannya.²⁰ Selain itu, negara modern juga dipandang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ditimbulkan oleh diberlakukannya sanksi ekonomi atas dirinya. Untuk meminimalisir dampak sanksi ekonomi, negara target melalui kemampuan administratifnya dapat melakukan substitusi komoditas-komoditas yang dilarang dalam sanksi berupa pembatasan impor. Substitusi juga dapat diterapkan dalam menanggulangi larangan ekspor, dengan cara mencari negara lain sebagai pengganti tujuan ekspor agar kegiatan ekspor komoditas yang dilarang dalam sanksi dapat terus berjalan. Cara yang dilakukan oleh negara target untuk

²⁰ Robert A. Pape. “*Why Economic Sanctions Do Not Work?*”. *International Security*, Vol. 22 No. 2 (1997), Hlm. 106-107.

menanggulangi sanksi ekonomi ini tidak dapat diantisipasi oleh negara pemberi sanksi. Menurut Pape, kemampuan negara target ini apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama, bahkan permanen, memungkinkan negara pemberi sanksi untuk mendapatkan dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak yang timbul bagi negara target.²¹ Paparan Pape mengenai dampak sanksi ekonomi bagi negara target digunakan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana implikasi yang timbul dari sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia serta bagaimana Rusia menghadapi sanksi tersebut.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengandalkan penjelasan makna data secara jelas yang dilakukan dengan triangulasi data atau menggabungkan data-data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber-sumber data yang telah ada.²² Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan analisa. Selain itu, hubungan sebab-akibat juga digunakan dalam penelitian ini guna memberikan penjelasan terkait alasan mengapa terjadi ekstensi sanksi atas Rusia oleh Uni Eropa.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi

²¹ Ibid., Hlm. 107.

²² John W. Cresswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications (2014).

pustaka dan literatur. Tipe data yang dicari dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, artikel berita, atau data dalam media elektronik seperti data dalam situs jejaring resmi organisasi internasional dan negara yang terkait dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini. Referensi yang diambil oleh penulis diharapkan dapat menghindari penyajian data yang kurang tepat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bagian sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II memaparkan alasan-alasan yang menyebabkan keterlibatan Rusia dalam krisis yang terjadi di Krimea sehingga dapat terjadi peristiwa aneksasi Krimea dari Ukraina. Setiap penyebab dibahas dalam bagian yang berbeda-beda, sejumlah empat bagian. Selain itu, dijelaskan pula perjanjian Minsk I dan II yang menjadi upaya permulaan bagi kubu Uni Eropa dalam upaya untuk menekan pergerakan Rusia di Ukraina, khususnya Krimea.

Bab III memaparkan pemberian sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Uni Eropa kepada Rusia sebagai bentuk respon Uni Eropa atas peristiwa tersebut setelah kegagalan yang dialami perjanjian Minsk I dan II. Bab ini terbagi menjadi tiga bagian, dimana bagian pertama memaparkan latar belakang pemberian sanksi ekonomi. Bagian kedua memaparkan penerapan sanksi ekonomi kepada Rusia.

Bagian ketiga memaparkan bagaimana upaya Rusia dalam menanggulangi dampak sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa.

Bab IV memaparkan hasil analisis dan jawaban dari pertanyaan riset yang telah disajikan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan ekstensi masa berlaku sanksi ekonomi Uni Eropa kepada Rusia pasca aneksasi Krimea.

Bab V berisi Kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan bab-bab sebelumnya mengenai alasan dilakukannya ekstensi sanksi ekonomi Uni Eropa kepada Rusia pasca aneksasi Krimea, dengan menjelaskan kembali inti pembahasan dari setiap bab secara singkat serta penjabaran singkat terkait alasan di balik ekstensi sanksi ekonomi tersebut untuk menutup penelitian ini.